

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat pada hakikatnya terus berdinamika, dengan dinamika ini masyarakat secara individualitas maupun kolektifitas mengalami perubahan, baik berupa perubahan sosial, politik, budaya. Menggambarkan Indonesia yang ciri masyarakatnya beragam, terkadang dengan seperti ini kita harus melihat konteks demokrasi yang terdapat muatan esensial seperti budaya, politik, sosial dan agama, yang akrab berkolaborasi membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat tentang demokrasi menuju sebuah perubahan seperti yang dimaksud.

Kehadiran demokrasi di dunia, khususnya di Indonesia, membawa nilai baik untuk sebuah *good governance*, dengan tujuan kemaslahatan bersama, disatu sisi hadirnya demokrasi di tengah masyarakat multikultur, menimbulkan berbagai macam pengukuran variatif untuk bagaimana demokrasi di Indonesia bisa berjalan baik. Kita bisa mengambil contoh sebuah pengukuran yang dilakukan oleh lembaga *Freedom House*, tahun 2006 sebuah lembaga yang melakukan pengukuran demokrasi atau kebebasan negara-negara di dunia setiap dua tahun, memberikan skor kepada Indonesia tiga, yaitu dengan proses demokrasi sudah sejajar dengan negara-negara berkembang. Namun dalam majalah *The Economist*, yang mengeluarkan *Democracy Index* setiap tahun, pada tahun 2010 menempatkan Indonesia pada peringkat enam puluh dan menggolongkan

demokrasi Indonesia sebagai “*flawed democracy*”, jauh di bawah negara-negara yang termasuk ke dalam “*full democracy*” (peringkat 1 sampai dengan 20).¹

Pengukuran ini tentunya tidak maksimal, mengingat Indonesia adalah negara besar dengan tingkat keragaman antar daerah yang besar pula, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, politik, budaya dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keragaman ini juga membawa keragaman dinamika demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, begitu sinergi untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar-provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu. Meskipun, demokrasi adalah konsep multidimensional yang kompleks. Oleh karena itu pengukuran demokrasi, harus secara konseptualisasi demokrasi yang jelas dalam menyusun Indeks dan kontekstualisasi dalam praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di suatu tempat.²

Dengan memperhatikan penjelasan sebelumnya terkait demokrasi di negara pluralistik seperti Indonesia, memungkinkan akan terjadinya perubahan. Perubahan ini lebih mengarah pada hal-hal yang bersipat politis, budaya dan lain-lain, baik dalam ranah nasional sampai pada tingkat lokal. Sehingga dalam kenyataannya bahwa perubahan yang terjadi bukan saja di kawasan tempat masyarakat bermukim seperti di perkotaan yang nota bene penduduknya padat, tetapi di kawasan lingkungan atau desa (fisik) banyak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi begitu multidimensi termasuk hal-hal yang sebelumnya

¹ Maswadi Rauf, dkk. *Indeks Demokrasi Indonesia 2010 Kebebasan Yang bertanggung jawab dan substansial: sebuah tantangan*, (Badan Pusat Statistik, 2010), hlm. 15.

² Maswadi Rauf, dkk. *Ibid*, hal. 16

disebutkan penulis namun perubahan yang nampak atau dominan terjadi seperti pada struktur juga fungsi masyarakat itu sendiri (non fisik).

Dalam masyarakat ada yang dikatakan sebuah proses sosial, yang terjadi diberbagai ciri masyarakat. Dimana proses sosial biasanya menghasilkan keadaan dan struktur sosial yang sama sekali baru, serta proses sosial seperti ini menciptakan dan menghasilkan perubahan mendasar.³ Namun yang menjadi indikasi penyebab perubahan tersebut begitu multidimensi dan terhitung sulit untuk mengukur faktor-faktor indikasi tersebut (non fisik), seperti budaya. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan budaya seperti apa, juga cara bagaimana mengetahui masyarakat terlibat dalam partisipasi perpolitikan dilingkungannya.

Namun beberapa segi yang harus ditinjau kembali, yang menjadi dasar dari bagaimana perubahan sosial bisa berjalan baik. Hal yang mendasar ini seperti budaya suatu kelompok masyarakat, budaya bisa memperbaiki sistem sosial, juga sistem politik. Seperti asumsi yang meletakkan budaya sebagai penentu untuk berlansungnya transformasi sosial. Berlansung atau tidaknya sebuah transformasi dan dalam bentuk apa transformasi itu berlansung ditentukan oleh bagaimana budaya itu dibentuk.⁴

³ Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Prenada Media, 2005), hlm. 16.

⁴ Lihat A. Bakir Ihsan dalam Andito (editor), *Atas Nama Agama : Beragama secara kultural dan struktural*, Pustaka Hidayah, Hlm. 113. menjelaskan peran 'budaya' sebagai dasar untuk berhasilnya sebuah sistem sosial, politik.

Seiring dengan realitas dinamika yang tercipta dalam sebuah *komunitas*⁵, paling tidak kita bisa mengerti suatu dimensi perubahan yang terjadi, dalam artian semua hal yang telah mengalami perubahan, belum bisa ditentukan atau belum bisa dipastikan bahwa hal ini telah mengalami perubahan secara keseluruhan, kita bisa mengambil sebuah contoh perubahan sebuah budaya seperti demokrasi yang akrab kita dengar ciri-ciri suatu sistemnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶ Oleh karenanya bisa saja perubahan yang terjadi dari budaya sistem demokrasinya adalah “oleh rakyat, dan untuk rakyat” sehingga menyisahkan suatu sistem “dari rakyat” yang tidak mengalami perubahan.

Sistem dari rakyat inilah yang merupakan sebuah bangunan esensial budaya yang tidak berubah, karena pada hakikatnya semua pemimpin berasal dari rakyat. Beranjak dari contoh tersebut, seperti terdapat kesamaan dengan sebuah bangunan politik kelompok masyarakat, yang terkadang membutuhkan hal objektif dalam memperhatikannya. Oleh karena kita tahu bersama bahwa semua individual dalam masyarakat dalam dinamikanya berpolitik, meskipun politik dalam artian tidak memperebutkan kekuasaan dan lain-lain. Namun jika kita melihat realitas politik dalam ruang yang besar seperti sebuah negara maka akan terlihat suatu sistem aturan yang mengendalikan politik itu sendiri, seperti rezim ‘Orde Baru’ menduduki suatu kepemimpinan tertinggi maka struktur yang dibawahnya harus individu berideologi sama dengan pola kepemimpinan orde baru, baik melalui

⁵ *Komunitas* dalam kamus Sosiologi oleh (Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko) mengartikan ‘komunitas’ sebagai kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, serta memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preverensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi yang serupa.

⁶ Jamhur Poti, *Demokrasi Media massa dalam prinsip kebebasan*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 17. Menjelaskan tentang sistem demokrasi, yang secara umum sering kita dengar yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

jalur orientasi partai, pembuatan peraturan perundang-undangan, kultur politik, serta aktor politik, sehingga kepentingan daerahlah yang sering dirugikan dan ini menimbulkan protes dari masyarakat karena mereka menganggap intervensi pemerintah pusat terlalu besar.⁷

Dalam realita ini mungkin kita sepakat menggunakan kata rekayasa politik dalam hal ini, mengapa demikian bahwa sepertinya dalam dinamika yang ada elit⁸ politik tertentu sengaja memainkan dinamika tersebut, untuk bagaimana bisa memperoleh pendukung yang banyak dari suatu wilayah, ini merupakan sebuah realita bahkan problem yang tidak hanya terjadi dalam sebuah ruang yang besar seperti negara tetapi dalam ruang lingkup terkecilpun bisa terjadi hal serupa. Seperti sebuah provinsi bahkan dalam sebuah desa. Hal serupa yang terjadi di Desa Luwoo, Kecamatan. Telaga Jaya, Kabupaten. Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dugaan sementara bahwa dinamika yang terjadi di sebuah komunitas lokal Luwoo ini merupakan sebuah budaya politik yang terbangun sejak lama dan diperkuat oleh sistem religius komunitas ini oleh elit-elit politik lokal.

Dinamika politik ini bisa dilihat dalam berbagai kondisi pemilihan umum yang dilaksanakan, dimana partai beraliran religius selalu memenangkan pemilu, terhitung sejak tahun 1955 partai SI memenangkan pemilu, sampai tahun 1971 partai NU kembali memenangkan pemilu, hingga pada tahun 1977 partai persatuan pembangunan (PPP) turut andil dalam memenangkan pemilu hingga sekarang.

⁷ M. Mufti Mubarak, *Sukses Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Lansung*, (Java Pustaka, 2012), hlm. 27.

⁸ Jepri Pioke, *Dinamika elit lokal Suwawa*, *SKRIPSI*, pada lembaga pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, 2013, hlm. 40.

Partai dengan basis islam ini terhitung sejak tahun 1955 sampai tahun 1977 begitu kuat mempertahankan posisinya sebagai partai pemenang disetiap pemilunya. Disisi lain tahun pemenangan partai islam adalah tahun dimana partai yang didukung oleh rezim orde baru begitu kuat, seperti partai Golkar. Disetiap kawasan negara Indonesia partai kuning begitu kuat dengan legalitasnya sebagai partai yang didukung oleh rejim orde baru, dengan kekuatan elit-elit disetiap daerah. Namun dari kekuatan ini sepertinya tidak bisa membandingi kekuatan partai komunitas lokal yang disetiap pemilihannya selalu meraut kemenangan, dari contoh lain, partai yang didukung partai islam selalu menang seperi partai PPP yang mendukung Hamzah Haz pada pilpres tahun 2004.⁹

Realita politik ini membuat sebagian kita harus bertanya, apa sebenarnya yang mendasari perilaku politik seperti ini, sehingganya membentuk sebuah bangunan budaya politik yang kokoh ditengah realita demokrasi yang begitu memprihatinkan, disetiap daerah-daerah kawasan Indonesia. Dalam dinamika politik yang ada begitu mempengaruhi perilaku politik.

1.2. Rumusan masalah

Dengan berdasarkan latar belakang masalah di atas tentunya kita sedikit berfikir mengenai masalah yang sebenarnya kita hadapi saat ini untuk mewujudkan demokrasi kekinian sebagai konstruksi arif dalam berpolitik, sehingganya bisa dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik lokal warga Luwoo ?

⁹ Mustapa R. Adam, wawancara tentang dinamika politik Luwoo, Jumat, 6 Maret, jam 16.30

2. Bagaimana perilaku politik warga Luwoo ?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian yang berjudul “*Dinamika Politik Komunitas Lokal*” ini yang awalnya merupakan sebuah kegelisahan peneliti dalam melihat kondisi masyarakat diberbagai daerah yang memiliki dinamika politik serupa seperti pada pemilihan umum, yang sepertinya di lokasi tempat studi penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan tempat lainnya dalam hal memperlakukan politik begitu arif dan memiliki nuansa religius sebagai pemersatu, oleh karenanya beberapa tujuan yang secara fundamen harus ditelaah peneliti seperti :

1. Ingin menyimpulkan bagaimana dinamika politik lokal Luwoo.
2. Ingin mengetahui bagaimana perilaku politik warga Luwoo, dan faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika politik lokal warga Luwoo, yang selama ini berkontribusi banyak dalam melahirkan kader-kader politik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, mengembangkan ilmu sosiologi terutama pada studi dinamika politik warga masyarakat lokal desa Luwoo, kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.

